

**KUALITAS MANUSIA INDONESIA MEMASUKI ABAD KE 21  
DITINJAU DARI SUDUT ETIKA AKADEMIK**

Oleh

Eri Barlian

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TGL. :	8.03 MAR 1998
SUMBER / KARGA :	K /
KOLEKSI :	K
NO. INVENTARIS :	291 K (98. K2 (2))
KLASIFIKASI :	378.01 BAR - K2

Disampaikan pada seminar tanggal 26 Desember 1997.  
Jurusan Pendidikan Keperawatan  
Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan  
IKIP Padang

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

KUALITAS MANUSIA INDONESIA MEMASUKI ABAD KE-21  
DITINJAU DARI SUDUT ETIKA AKADEMIK

Oleh  
ERI BARLIAN

---

## Pendahuluan

Di antara negara-negara berkembang Indonesia menduduki tempat yang terpendang dilihat dari sudut kesempatan memperoleh pendidikan dasar. Di antara 150 negara berkembang Indonesia termasuk dalam jajaran 30 negara yang tingkat partisipasi anak usia 7 - 12 tahun telah mencapai 96%. Banyak diantara negara berkembang yang sasarannya untuk tahun 2000 baru 80%. Ini pun diragukan dapat tercapai karena ada yang baru mencapai angka partisipasi 40% (Unesco, 1996).

Berkat tekad pemerintah untuk memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, data statistik menunjukkan bahwa pada jenjang SD, jumlah peserta didik yang terdaftar naik 13 juta (1973/1974) menjadi 29,7 juta (1993/1994) atau terdapat kenaikan sebesar 228 persen. Dalam kurun waktu yang sama jumlah peserta didik pada jenjang SLTP naik dari 1,5 juta menjadi 7,1 juta atau terdapat kenaikan sebesar 473 persen, sedangkan pada jenjang SLTA naik dari 0,7 juta menjadi 4,2 juta atau tercatat kenaikan sebesar 600 persen ( Statistik Pendidikan, 1995).

Kita bangga mendapat penghargaan (Medali Emas Avicenna) dari Unesco karena berprestasi memeratakan

pendidikan. Banyak gedung sekolah yang sudah dibangun, wajib belajar 6 tahun ditingkatkan menjadi 9 tahun. Malah dalam GBHN 1993 ilmu menjadi salah satu asas pembangunan dan sumberdaya manusia menjadi sasaran pembangunan jangka panjang tahap II.

Di balik semuanya itu kita cemas melihat keadaan pendidikan. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan dari berdirinya Negara Indonesia yang merdeka, nampak belum memperoleh perhatian yang memadai. Dari segi anggaran dana untuk pendidikan pemerintah hanya mampu mengeluarkan 2,15-2,3% dari GNP. Di samping itu pendidikan mempunyai problema dasar yang perlu diperhatikan dalam mencapai strategi pendidikan nasional.

Akhir-akhir ini makin terasa adanya kecendrungan menurunnya peranan masyarakat akademis. Awal melemahnya kekuatan kampus adalah sejak diperkenalkannya konsep NKK 1977/1978. Sejak itu terjadi proses birokratisasi di perguruan tinggi. Organisasi mahasiswa mulai diatur sesuai dengan kepentingan birokratisasi, yaitu usaha untuk meningkatkan stabilitas politik nasional (Afan Gafar, Kompas, 10-11-1993).

Kasus penjiplakan skripsi S1 dari perguruan tinggi swasta menjadi tesis S2 perguruan tinggi negeri ternama dan penjiplakan skripsi mahasiswa oleh dosen pembimbing merupakan cerminan kultur dan struktur dunia akademik di Indonesia saat ini.

Berdasarkan uraian di atas makalah ini mencoba memberikan sebuah renungan tentang kualitas manusia Indonesia memasuki abad ke 21 ditinjau dari sudut etika akademik.

### Masalah Dasar Pendidikan Nasional

Meskipun kita telah menjalani proses pembangunan pendidikan yang cukup panjang, namun upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan belum memperoleh perhatian yang memadai. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

*Pertama*, secara geografis terdapat diversifikasi kemampuan awal peserta didik antara yang berasal dari wilayah Indonesia Timur dan yang berasal dari Indonesia Barat, Tengah, wilayah terpencil dan wilayah berpulau; wilayah pegunungan; wilayah pantai, wilayah pedesaan, wilayah industri dan wilayah agraris. Seirama dengan kondisi geografis ini pola persebaran penduduk juga sangat bervariasi, misalnya Pulau Jawa yang luasnya kurang dari 7 persen wilayah Indonesia dihuni 60 persen penduduk. Akibatnya terjadi variasi rasio antara peserta didik dengan kelas, guru dan sekolah, maupun peserta didik dan guru.

Keadaan ini membawa implikasi dalam proses transformasi keseluruhan proses pendidikan nasional. Sejauh mana kesenjangan-kesenjangan ini dapat dikendalikan se-

hingga kemampuan anak antara daerah kota dan desa, industri dan agraris, wilayah pantai dan pegunungan, daerah Indonesia barat, timur dan tengah dapat selaras.

*Kedua*, secara sosio-ekonomis terdapat peserta didik yang berasal dari kalangan keluarga lapisan bawah yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam kondisi seperti itu kelompok masyarakat ini masih belum memandang pendidikan sebagai kebutuhan yang mendasak. Sebaliknya terdapat peserta didik yang berasal dari kalangan keluarga yang berstrata ekonomi tinggi. Anak-anak dari kalangan ini mempunyai sarana belajar yang memadai, mempunyai iklim belajar yang lebih sehat dan dapat masuk sekolah unggulan. Bahkan sekarang ini banyak peserta didik yang belajar keluar negeri sebelum tingkat perguruan tinggi.

Kesenjangan ini akan terasa lebih eksrim lagi pada daerah kota dan desa atau daerah Indonesia timur dengan Indonesia barat. Bagaimana kesenjangan ini dapat diperkecil karena akan berimplikasi terhadap pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak proposional.

*Ketiga*, secara sosio-kultural terdapat peserta didik yang berasal dari kalangan yang masih berorientasi pada nilai-nilai tradisional, berwawasan sempit, sulit sekali menerima pembaharuan karena pengetahuan dan cakra-  
walanya sangat terbatas. Mereka hidup dalam sistem kehidupan yang relatif statis, penuh kepasrahan, kurang kegaira-

han untuk keluar dari jeratan sistemnya. Sebaliknya terdapat pula peserta didik yang berasal dari kalangan keluarga yang berorientasi pada penguasaan ilmu dan teknologi, berwawasan luas dan berfikir jauh kedepan. Kalangan ini sangat terbuka terhadap pembaharuan-pembaharuan, dinamis, kompetitif, dan memiliki kemauan untuk meraih kemajuan.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa suatu perjuangan yang sungguh-sungguh dan bertanggung jawab besar untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, di samping sebagai perwujudan dari amanat GBHN 1993 juga sebagai tuntutan masa depan agar kita berada dalam barisan depan dalam percaturan global.

### Masyarakat Akademik

Ilmu dan teknologi tidak mungkin berkembang dengan sendirinya. Memajukan ilmu dan teknologi bukanlah sekedar menyediakan dana dan peralatan saja tapi lebih dari itu. Prasyarat utama terletak pada penyaluran hasrat ingin tahu bagi pengembang kreativitas dan prakarsa. Di samping itu iklim sosial yang menguntungkan akan mampu mengembangkan ilmu dan teknologi jika menggunakan etika.

K. Bertens (1993:6) menyatakan ada tiga pengertian etika. Pertama sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral

yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya, Kedua sebagai kumpulan asas atau nilai moral dan Ketiga, ilmu tentang baik buruk.

Etika ilmu pengetahuan dan teknologi menurut Soerjani (1997a:94) mempunyai urutan sebagai berikut :

1. Kejujuran dan objektivitas.
2. Pengabdian iptek yang perlu lebih memperhatikan kepentingan berbagai pihak dari lapisan masyarakat baik yang kuat maupun yang lemah, atau yang kaya maupun yang miskin, khususnya, masyarakat kecil yang rentan (Vulnerable), misalnya ; yang miskin, cacat, kumuh tanpa mengabaikan kepentingan golongan masyarakat lainnya.
3. Penyelesaian masalah dan dampak lingkungan dari pengembangan iptek oleh ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dengan kata lain jangan menggunakan teknologi yang tidak disertai kemampuan untuk mengatasi masalah lingkungan yang ditimbulkannya.

Seorang ilmuwan pertama-tama harus mencintai ilmunya dan mempunyai nafsu ingin tahu. Ia seorang kritis dan terbuka pada kritik, senang berdiskusi. Ia tidak puas dengan kesan pertama, melainkan mencari dalil-dalil pertama. Kepentingan umum menjadi orientasi perjuangannya. Ia tidak menganggap dirinya sebagai perwalian salah satu golongan masyarakat, justru ia harus mengatasi pengolongan sempit berdasarkan kesukuan (Franz Magis S,1992:60-62).

Etika akademis ialah jumlah dari kewajiban-

kewajiban yang berlaku bagi orang-orang yang menjabat sebagai akademikus (Shils, 1993:177). Etika akademis hanya bersangkutan paut dengan usaha menggali dan menyebarkan pengetahuan ilmiah dan humaniora di dalam perguruan tinggi dan antar perguruan tinggi serta bertalian dengan kegiatan-kegiatan yang membawa pengetahuan itu ke luar perguruan tinggi. Kewajiban tidak boleh lepas dari hak. Suatu tugas hanya pantas dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hak dan yang berwenang.

Masyarakat akademik sebagian besar dididik dan dibina melalui sistem pendidikan sumber daya manusia yang terpadu yang mengarah kepada paradigma pembangunan berkelanjutan yang dimengerti, dipahami dan dilaksanakan oleh segenap perencana, pelaksana dan pemantau pembangunan. Masyarakat akademik tidak hanya dibina pada tahap terakhir dari pendidikan formal, melainkan dimulai dengan pengertian dasar yang perlu ditanamkan secara dini dalam pendidikan awal (Soerjani, 1997b:5).

Sidney Hook dalam Murtianto (1995) menyatakan kebebasan akademis adalah kebebasan yang dimiliki oleh para profesional berkualitas di bidangnya untuk menyelidiki atau mempelajari, memperdebatkan, mempublikasikan atau mengajarkan kebenaran yang mereka lihat dalam disiplin ilmu yang mereka kuasai, tanpa dipengaruhi oleh kontrol agama, politik atau penguasa, kecuali metode-metode rasional ilmu yang bersangkutan dimana kebenaran itu diban-



gun. Kebebasan akademik bukanlah untuk mengajarkan kebenaran mutlak, melainkan kebebasan untuk mencari kebenaran terus-menerus.

Kebenaran yang kini kita lihat harus tetap dilihat sebagai kebenaran sementara sampai saatnya muncul kebenaran yang lebih sahih. Hukum Newton tetap dipegang sampai munculnya hukum relativitas Einstein. Disinilah keterbukaan dunia akademis. Keterbukaan menjadi esensi dunia akademis, terbuka untuk penjernihan dan terbuka untuk dialektika. Dialektika bukan hanya salah - benar tetapi benar lawan benar, baik lawan baik dan benar lawan baik. Itulah sebabnya perguruan tinggi/masyarakat akademis dapat dikatakan tempat berkompetisinya ide, sehingga yang benar adalah ide yang paling masuk akal.

Kebebasan akademis mempunyai komitmen untuk bermain *fair play*. Seorang profesional berkualitas yang selalu mencari kebenaran dengan tetap berpegang pada kode etik profesional, berhak untuk membuat kesimpulan yang menurutnya valid tanpa tekanan dari pihak manapun. Artinya dia memiliki semacam hak untuk berfikir alternatif dalam bidang yang dikuasainya. Cendekiawan lain yang tidak setuju silahkan membantah dengan pendekatan ilmiah juga. Bila bantahan memakai pendekatan non-ilmiah dan kekuasaan ditambah alasan kurang sopan, susah diatur, vokal, maka saat itu juga etika akademis telah dihempaskan oleh palu godam non-ilmiah.

Menurut M. Soerjani (1997b:6) pengembangan masyarakat akademik dapat sangat multidimensional, tetapi intinya adalah :

1. Melalui pendidikan formal serta pendidikan non-formal atau pembinaan; termasuk kursus, pemagangan .
2. Melalui pemberian makna akademik yang mendasar, termasuk kepercayaan diri (Self-confidence), kejujuran, objektivitas, ketidak pemihakan dan sebagainya.
3. Melalui pencukupan sarana dan prasarana akademik, seperti : perpustakaan, data, informasi dan sebagainya.

Dalam Agenda 21 dan KTTT Bumi di Rio de Janeiro dikatakan bahwa sebagai lembaga sosial maka pendidikan atau pembinaan masyarakat akademik adalah kewajiban mutlak yang dilaksanakan dengan keikhlasan dan tanpa pamrih apapun.

#### Penutup

Bangsa Eropah mengalami perkembangan zaman dengan evolusi, sementara kita mengalami lompatan dari zaman abad pertengahan yang magis mistik, percaya tahyul lalu melompat ke zaman elektronik yang canggih. Lompatan inilah yang menghadirkan kesulitan. Atau dengan kata lain disatu pihak kita hidup di dalam dunia tradisional tetapi di lain pihak berbagai kemajuan memaksa kita HIDUP DI ZAMAN LAIN>

378.01

BAR.

K(2)

Masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai ilmu dan teknologi. Kompetensi dalam ilmu dan teknologi ditentukan oleh watak, orientasi, nilai-nilai dan sikap profesionalisme orang yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu selama masyarakat akademis belum merupakan masyarakat ilmuwan yang mencari pengetahuan objektif dan universal, yang mengutamakan ilmu bukan gengsi, bersikap terbuka dan terus bertanya "mengapa" sehingga tidak mudah percaya terhadap hal-hal yang belum diuji. Di samping itu selama dosen-dosen belum memberi teladan, selama itu para penuntut ilmu lebih mencari ijazah dari pada ilmu.

29/12/98 (u)

## DAFTAR BACAAN

- Depdikbud. (1995) Statistik Pendidikan, Jakarta.
- Gaffar, Afan. (1993) Peran Kampus Cenderung Menurun, Kompas 10 Novemer 1993.
- K. Barten. (1993) Etika. Jakarta : Gramedia.
- Magis Suseno, F. (1992) Ilmu Pengetahuan, Tenologi dan Manusia di Belakangnya, Jakarta : PT Gramedia.
- Shils, Edward. (1993) Etika Akademis, Terjeahan. Agus Nugroho, Yayasan Obor Indonesia.
- Soerjani, M. (1997 a) Pembangunan dan Lingkungan : Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development, IPPL Jakarta.
- Soerjani, M. (1997 b) Masalah Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Upaya Meningkatkan Kecerdasan Sumber Daya manusia, Makalah untuk Dewan Riset Nasional, Yogyakarta 9 Agustus 1997.
- Unesco. (1996) Education For All Achieving The Goal, Statistical Document. Paris.